

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Kantor Pemerintah Kab. Bima)

Julaiha^{1*}, M. Cholid Mawardi², Arista Fauzi Kartika Sari³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: Jullaiha81@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional management information systems, human resource quality, application of government accounting standards, and internal control systems on the quality of regional government financial reports. The population in this study were employees working in the regional apparatus organization of Bima Regency. The sampling technique used the purpose sampling method, the number of samples used in this study was 71 respondents. The data used in this study were primary data, obtained directly from respondents through the distribution of questionnaires. The data obtained were analyzed using multiple linear regression methods. The results of the study showed that the regional management information system and internal control system had a significant positive effect on the quality of reports, while the quality of human resources and the application of government accounting standards did not have a significant effect. Thus, the effectiveness of the use of SIMDA and strengthening the internal control system are key factors in improving the quality of regional financial reports. On the other hand, efforts to improve the quality of human resources and SAP still require further development in order to make a real contribution to the quality of financial reports.

Keywords: SIMDA, resource quality, Application of accounting standar, internal control system

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengelola laporan keuangan sebagai sarana pengendalian serta bentuk pertanggungjawaban atas berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu cara pemerintah menunjukkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melalui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelola keuangan daerah yang diwujudkan melalui laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Lynda et al (2019) Pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi keuangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Laporan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi keuangan Pemerintah secara akurat, andal, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kualitas Laporan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kinerja instansi Pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang baik harus akurat, relevan, andal, dan mudah dipahami. Ketika badan pengawasan keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, berarti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas disajikan secara wajar dan berkualitas.

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti penerapan sistem informasi yang tepat, kualitas SDM, kepatuhan pada SAP, serta efektivitas pengendalian internal yang tepat dan efisien yang sangat berperan dalam memastikan transparansi dan akurasi data. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan Aplikasi sistem informasi manajemen daerah. SIMDA yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah satu bentuk teknologi

informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap dan terintegrasi (Runtuwene et al., 2017).

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam pengelolaan keuangan, Menurut Winsyah (2012) Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka dalam pembuatan laporan keuangan juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Standar akuntansi Pemerintahan yang konsisten akan memastikan bahwa laporan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, sehingga meningkatkan keandalan dan kredibilitas laporan tersebut (PP No. 71/2010). Dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, pemerintah daerah dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, Peran Sistem Pengendalian Internal sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang menyeluruh dan dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemimpin serta seluruh staf untuk memberikan kepastian yang cukup mengenai tercapainya tujuan organisasi melalui aktivitas yang efisien dan efektif. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mendeteksi dan menangani risiko kesalahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, serta memastikan agar proses pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab (Halim, 2015). Oleh karena itu, Sistem pengendalian internal penting untuk dievaluasi guna mengetahui sejauh mana perannya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Bima sebagai daerah yang sedang berkembang, terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, dalam laporan yang disampaikan oleh BPK Perwakilan NTB pada Mei 2023, masih ditemukan sejumlah catatan penting yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek teknis dan pengendalian pelaporan keuangan. Salah satu temuan yang disorot adalah masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Di samping itu, pada tahun 2023 juga ditemukan adanya overestimasi pendapatan daerah, yang berpengaruh terhadap akurasi dan keandalan laporan yang dihasilkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat sistem dan regulasi yang mendukung, seperti penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), masih diperlukan optimalisasi dalam implementasinya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu aspek krusial untuk menjamin akurasi dan keandalan laporan keuangan. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah perlu terus diberikan pelatihan dan penguatan pemahaman terhadap Standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem pelaporan berbasis SIMDA, serta penguatan atas pengendalian internal. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan daerah secara objektif dan transparan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk meneliti sejauh mana kontribusi dari Sistem informasi Manajemen daerah, kualitas Sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bima.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Menurut Supriyono (2018:63) Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan hubungan

kontraktual antara partisipan dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan utamakan adanya kepentingan dalam mengoptimalkan keuntungan bagi partisipan. Menurut Jansen dan Mackling (1976), Hubungan agen dan partisipan mengacu pada kondisi dimana ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dimana agen lebih banyak memiliki informasi keuangan dibandingkan partisipan. Untuk menyelesaikan dan meminimalisir masalah keagenan, Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan, dapat mengurangi ketidakpastian serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengurangi (*information asymmetry*), dan pengendalian yang baik dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang (Nurilah, 2014).

Pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik adalah konsep yang berlandaskan pada teori keagenan. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai agen yang memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan pemerintah, yang berperan sebagai partisipan dalam mengevaluasi akuntabilitas dan membuat keputusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah sebagai agen diberi kewenangan untuk menjalankan tugas yang ditentukan oleh pengguna informasi keuangan, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya. Dalam hubungan keagenan ini pemerintah sebagai agen diharapkan untuk melaksanakan apa yang menjadi kepentingan dari para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai partisipan (Faristina, 2011).

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 1, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, adalah dokumen yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan kondisi keuangan serta berbagai transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Secara umum, laporan keuangan pemerintah adalah bukti pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya dipercaya, dan informasi ini penting bagi pemangku kepentingan yang membuat kepentingan tentang pengelolaan dan distribusi sumber daya.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan dapat tercermin dari karakteristik kualitatif sebagai berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Sistem Informasi Manajemen Daerah

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi pada level manajemen yang memberikan resume rutin dan laporan tertentu untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan Keputusan (Setiawan & Permadani, 2016). Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan aplikasi terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan administrasi pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Menurut (Lumintang, 2015) SIMDA dirancang untuk menyediakan informasi secara cepat, akurat, dan menyeluruh, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Adapun Tujuan di terapkan aplikasi SIMDA (BPKP 2008) adalah sebagai berikut :

1. Menjadi sarana pertukaran informasi antara unit kerja yang terhubung dalam jaringan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).
2. Menjadi alat komunikasi langsung antara unit kerja melalui pengguna webcam dalam jaringan Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)

3. Berfungsi sebagai media kontrol atas realisasi kegiatan, baik dari capaian fisik maupun penyerapan anggaran
4. Berperan sebagai *platform* awal dalam pelaksanaan e-government
5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Penerapan SIMDA di pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan implementasi yang efektif dari sistem informasi manajemen daerah, laporan keuangan akan menjadi lebih akurat, relevan, dan andal, sehingga manajemen dan pihak-pihak terkait dapat menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Wirawan (2015), sumber daya manusia mencakup individu-individu yang berperan sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh, atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam pencapaian keberhasilan organisasi. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya lainnya. Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat diukur melalui cara mereka menyelesaikan pekerjaan, serta kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas umumnya dilengkapi dengan pendidikan yang memadai, pengetahuan yang relevan, dan pengalaman yang cukup (Cahyani et al., 2020). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, Organisasi perangkat daerah perlu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini harus didukung oleh latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, keterlibatan yang rutin dalam pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman yang cukup di sektor keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, standar akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah rangkaian prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengarahkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari standar ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut (Bastian, 2010) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki kekuatan hukum yang memastikan laporan keuangan pemerintah di Indonesia dengan kualitas yang tinggi, transparan, dan akuntabel. Setiap aparat yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan, baik di Tingkat pemerintah pusat maupun daerah, harus memahami standar akuntansi pemerintah dengan baik. Setiap undang-undang pemerintah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, laporan keuangan akan lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Tingkat pemerintah daerah.

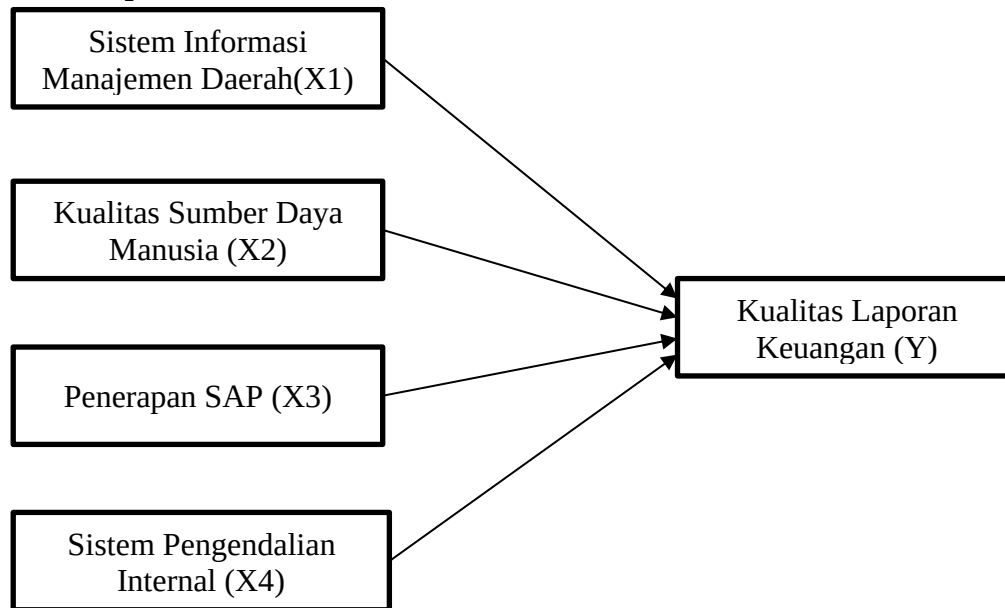
Sistem pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang digunakan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai dan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ada lima komponen SPI: (1) lingkungan pengendalian, (2) analisis Resiko (3) tindakan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) dan pemantauan.

Menurut Martini (2022) Penerapan pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Hal itu juga dapat meningkatkan kepatuhan kebijakan manajemen dan memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

keuangan. Pengendalian internal harus diterapkan secara rutin dan dipantau secara berkala untuk menemukan risiko memperbaiki kesalahan, Dengan pengawasan yang konsisten (Gustina, 2021).

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti, kemudian diambil kesimpulannya, populasi tidak hanya merujuk pada jumlah objek atau subjek tersebut (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di 7 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bima. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:120). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) pegawai yang bekerja pada bagian keuangan atau penyaji laporan keuangan di OPD Kabupaten Bima, (2) memiliki pengalaman minimal 1 tahun kerja di bagian keuangan atau penyaji laporan keuangan.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data primer menjadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, Menurut Sugiyono (2019:194) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden. melalui metode angket, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Penilaian dari kuesioner tersebut akan diukur dengan skala likert 1 sampai 5.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan statistik, Uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji normalitas. uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas. uji regresi linear berganda dan uji Hipotesis (uji F), (uji R²), (uji t).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian ini terdiri dari pegawai yang bekerja pada bagian keuangan atau menyajikan laporan keuangan pemerintah selama minimal satu tahun di 7 organisasi perangkat daerah Kabupaten Bima.

Tabel 4.1 Sampel Terpilih

NO	Instansi	Jumlah Pegawai	Kriteria	Persentase
1.	Dinas Kesehatan	14	10	14,08%
2.	Dikpora	14	11	15,49%
3.	BPKAD	11	11	15,49%
4.	Dinas PUPR	13	11	15,49%
5.	Dinas Pertanian	11	8	11,27%
6.	Dinas PMD	11	10	14,08%
7.	Inspektorat	12	10	14,08%
	Total	85	71	100,00%

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 71 responden yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan atau penyajian laporan keuangan selama minimal satu tahun. Sesuai dengan kriteria *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Analisis Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	71	3	5	3,72	0,62
X2	71	2	5	3,41	0,78
X3	71	3	5	3,75	0,66
X4	71	2	5	3,69	0,67
Y	71	3	5	3,65	0,61
Valid N	71				

Sumber: data primer diolah, 2025

Dari tabel 4.6 diatas diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap variabel X₁ sebesar 3,72 dengan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5. Rata-rata tanggapan responden terhadap variabel X₂ sebesar 3,41 dengan nilai minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5. Selanjutnya, rata-rata tanggapan responden terhadap variabel X₃ sebesar 3,75 dengan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5. Untuk variabel X₄, rata-rata tanggapan responden sebesar 3,69 dengan nilai minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5. Sementara itu, rata-rata tanggapan responden terhadap variabel Y sebesar 3,65 dengan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5.

Nilai standar deviasi pada variabel X₁ sebesar 0,62, variabel X₂ sebesar 0,78, variabel X₃ sebesar 0,66, variabel X₄ sebesar 0,67, dan variabel Y sebesar 0,61. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini menunjukkan adanya variasi tanggapan responden pada setiap variabel. Namun, secara umum nilai standar deviasi yang tidak terlalu tinggi mengindikasikan bahwa data pada masing-masing variabel cenderung kurang bervariasi, karena nilai tanggapan responden masih berada dalam kisaran yang relatif dekat dengan nilai rata-rata.

Uji kualitas Data

1. Uji validitas

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan nilai koefisien korelasi (r-hitung) masing-masing item pernyataan dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika r hitung > r-tabel dengan signifikan 0.05 (5%), maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nilai r tabel dengan jumlah n=71, nilai dari sampel (n-2) = 71-2= 69 sebesar 0.233. berdasarkan hasil pengujian

yang sudah dilakukan dapat dinyatakan bahwa kuesioner yang di dapatkan adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

2. Uji reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas laporan keuangan (Y)	0.84	0.60	Reliabel
SIMDA (X1)	0.78	0.60	Reliabel
Kualitas SDM (X2)	0.90	0.60	Reliabel
Penerapan SAP (X3)	0.91	0.60	Reliabel
SPI (X4)	0.85	0.60	Reliabel

Sumber: *Data primer diolah, 2025*

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa Berdasarkan pengujian reliabilitas, setiap item pernyataan pada masing-masing variabel diuji untuk menilai konsistensinya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6, sehingga item pernyataan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	154.949.509
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.053
	Negative	-.088
Kolmogorov- Smirnov		.088
asympt. Sig (2-Tailed)		.200 ^c

Sumber: *data primer diolah, 2025*

Tabel 4.4 diatas menunjukkan Hasil uji normalitas dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,088 dan nilai Asymp. Sig (2-Tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data untuk variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SIMDA (X1)	0.21	4.66	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas SDM (X2)	0.81	1.22	Tidak terjadi multikolinearitas
Penerapan SAP (X3)	0.11	8.81	Tidak terjadi multikolinearitas
SPI (X4)	0.20	4.95	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: *data primer diolah, 2025*

Berdasarkan hasil tabel 4.5 diatas menyatakan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF memiliki nilai lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
SIMDA (X1)	0,513	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas SDM (X2)	0,562	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Penerapan SAP (X3)	0,054	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SPI (X4)	0,228	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: *data primer diolah, 2025*

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode uji Glejser, di mana hasilnya dianalisis berdasarkan nilai signifikansi (Sig). Pada variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia (SDM), penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan sistem pengendalian internal (SPI), nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil Uji simultan (uji F)

Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji simultan (uji F)

ANOVA ^a						
model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	485.512	4	121.378	47.666	,000
	residual	168.065	66	2.546		
	Total	653.577	70			
a. Dependen Variabel: Y						
b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3						

Sumber: *Data primer diolah, 2025*

Berdasarkan Hasil uji F yang di dapat dalam penelitian ini adalah berdasarkan tabel 4.8 yang didapat nilai Sig 0,000 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah (X1), Kualitas SDM (X2), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) dan Sistem pengendalian Internal (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 ^a	0,743	0,727	1,596
a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3				

Sumber: *Data primer diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 4.9 *Model Summary*, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R² pada penelitian ini sebesar 0,727 (72,7%), maka dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3), dan Sistem Pengendalian Internal (X4) dalam menjelaskan variasi variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah sebesar 72,7%, sedangkan sisanya sebesar 27,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian

Uji Statistik t

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig.
		B	std. Error	Beta		
1	(Constanta)	2.903	1.946		1.492	0.140
	X1	0.296	0.143	0.279	2.072	0.042
	X2	0.040	0.044	0.64	0.925	0.358
	X3	0.161	0.151	0.197	1.065	0.291
	X4	0.325	0.112	0.404	2.908	0.005

a. Dependent Variabel: Y

Sumber: *Data primer diolah, 2025*

1. Hasil uji t variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (X₁) diperoleh nilai signifikansi 0,042 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.
2. Hasil uji t variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X₂) diperoleh nilai signifikansi 0,358 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil uji t variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₃) diperoleh nilai signifikansi 0,291 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil uji t variabel Sistem Pengendalian Internal (X₄) diperoleh nilai signifikansi 0,005 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif membutuhkan kombinasi sistem informasi yang andal, sumber daya manusia yang kompeten, penerapan standar akuntansi yang tepat, serta pengendalian internal yang kuat guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku serta efektivitas dalam penerapan sistem informasi dan pengendalian internal. Hasil penelitian ini Sejalan dengan penelitian Abidin dkk (2018), penelitian ini memperkuat temuan bahwa sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penerapan SAP berpengaruh positif.

Pengaruh sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik SIMDA maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan yang akurat dan transparansi.

Hasil ini mendukung Teori Keagenan (*Agency Theory*) oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara prinsipal (masyarakat atau pemangku kepentingan) dan agen (pemerintah). Dalam hubungan ini, informasi yang disajikan oleh agen sangat penting untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal. Penggunaan sistem informasi seperti SIMDA dapat meminimalkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh abdidin dkk (2018) dan Hendri & Erinos (2020), yang juga menemukan bahwa sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan sistem yang terintegritas, pengelolaan data keuangan menjadi lebih rapi, dan risiko terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan dapat diminimalkan.

Pengaruh Kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pegawai yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang berbeda-beda, faktor tersebut tidak secara langsung memengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah ketidakseimbangan dalam distribusi responden, di mana sebagian responden mungkin belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait akuntansi pemerintahan atau tidak berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu, jumlah responden yang terbatas juga dapat memengaruhi hasil analisis, sehingga pengaruh SDM terhadap kualitas laporan keuangan tidak tampak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sumber daya manusia merupakan faktor penting, namun dalam konteks penelitian ini, peranannya tidak muncul sebagai faktor yang dominan dalam menentukan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faturey dkk (2021) dan Lestary dkk (2023) yang juga menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan penelitian Abidin dkk (2018), Hendri & Erinos (2020), dan Puspitaningrum dkk (2021), yang menemukan bahwa kualitas Sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh tingkat pengalaman responden atau efektivitas sistem keuangan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun standar akuntansi pemerintahan telah diterapkan, hal tersebut tidak secara langsung menjamin kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah tingkat kepatuhan dalam penerapan standar akuntansi yang masih bervariasi di antara pegawai yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan. Ditinjau dari Teori Keagenan (*Agency Theory*), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) seharusnya menjadi salah satu mekanisme untuk meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan prinsipal melalui penyajian laporan keuangan yang andal, konsisten, dan transparan. Namun, jika agen tidak sepenuhnya memahami atau tidak patuh dalam menerapkan SAP, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan standar akuntansi saja tidak cukup, perlu adanya komitmen dari agen serta pengawasan aktif dari prinsipal untuk memastikan bahwa standar tersebut benar-benar diterapkan dengan tepat dan konsisten dalam praktiknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2023), yang juga menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Abidin dkk (2018) dan Faturey dkk (2021), yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan implementasi regulasi dan tingkat pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi di masing-masing daerah yang diteliti.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pengendalian internal yang kuat memungkinkan adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik terhadap proses penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan keuangan. Hasil ini mendukung Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara prinsipal (masyarakat atau pemangku kepentingan) dan agen (pemerintah). Dalam hubungan ini, informasi yang disajikan oleh agen sangat penting bagi pengambilan keputusan oleh prinsipal. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat meminimalkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal, serta membantu memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dengan demikian, sistem pengendalian internal menjadi salah satu mekanisme penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faturey dkk (2021) dan Lestari dkk (2023), yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan kontrol internal yang efektif sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal mereka dengan meningkatkan mekanisme audit dan pengawasan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan. Selain itu, perlu ada evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem pengendalian internal agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem informasi manajemen daerah kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas SDM, Penerapan SAP, dan SPI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan.
2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya berfokus pada organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bima, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu dapat mewakili secara menyeluruh kondisi daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.
2. Responden yang terlibat dalam penelitian ini hanya 7 OPD saja, hal ini membatasi representasi keseluruhan OPD di Kabupaten Bima.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum mencakup seluruh aspek yang secara potensial dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini kemungkinan adanya faktor-faktor penting lainnya yang belum dipertimbangkan dalam analisis.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya dengan melibatkan OPD dari beberapa kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik berbeda. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan generalisasi hasil penelitian yang lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah OPD yang lebih banyak serta mempertimbangkan keragaman jenis OPD yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang akan lebih representatif dan mampu menggambarkan kondisi nyata secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan menambah variabel-variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti peran audit internal, budaya organisasi, serta faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. K., Afifudin, & Junaidi. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 07(10), 32–45.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Cahyani, A. D., Mulyani, S., & Budiman, N. A. (2020). Pengaruh Akuntansi Berbasis SAK EMKM, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Karakteristik Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, September, 12–22.
<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/224/193>
- Faristina Rosalina. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Studi pada BLU di Kota Semarang. Skripsi Universitas Diponegor: Semarang.
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 10(1), 56–64.
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- L, L., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 2(2), 18–38.
- Lestari, R., Yudi, U., & Erwati, M. (2023). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan* ,

- Kualitas SDM , dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo*. 8(2), 283–302.
- Lumintang, N. D. (2015). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada. *Jurnal Riset Terapan* ..., 28. <file:///D:/matrik/Natalia Lumintang.pdf>
- Martini, R., Satirah, F. R., Nurhasanah, Ibrahim, K. B. C. S., Rachman, K., & Husin, F. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi Dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 11(1), 1420–1427. <http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/eksistansi/article/view/4595>
- Nurilah. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi, (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *JOM FEKON Universitas Diponegoro*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Runtuwene, C., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2017). Pengaruh Penerapan SIMDA, SAP, Motivasi Pegawai dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 299–307. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18452>
- Sinta Puspitaningrum, M. M. (2021). pengaruh implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (simda), kualitas sumber daya manusia, dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, Vol 35, No. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/jurnalpena.v35i1.1968>
- Supriyono, R. A. 2018. Akuntansi Kepriilaku. Gajah Mada University Press.Yogyakarta.
- Setiawan, A. T., & Permadani, R. P. (2016). Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Welasasih. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 7(Desember), 52–60
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sugiyono, P. D. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 291, 292.
- Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.
- Sarlota Faturey, Nicolas Ahuluheluw, F. H. B. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 368–379.
- Wansyah, H., Bakar, U., Banda Aceh, K., & Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, F. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Skpd Pada Provinsi Aceh. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 16(1), 43. www.medanbisnisdaily.com
- Wirawan, W. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia: Teori, Psikologi, Hukum Ketenagakerjaan, Aplikasi dan Penelitian: Aplikasi dalam Organisasi Bisnis, Pemerintahan dan Pendidikan. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*